



Peranan Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Fakfak

Randi Gandi Patiran

STIE OTTOW & GEISLLER FAKFAK

Abstract *In the Outline of the State Direction in Chapter IV of the Sixth Phase of Five-Year Development, part F of the economic field point 2, it is said that "Marine and Fisheries Development is continued and more directed towards efforts to increase income and more directed at increasing the income and living standards of fishermen and advancing the level of quality of life in coastal villages through increasing the diversification of fish production to meet food and nutrition needs and increase export value. Marine and fisheries development in Fakfak Regency during the first long-term development has shown positive results that can be shown by a fairly high increase in production accompanied by an increase in community fish consumption, an increase in fishermen's income for the community, an increase in inter-island and export fish marketing, an expansion of employment and business opportunities in the marine and fisheries sector. This study aims to find out how the marine and fisheries sector affects the increase in Regional Original Revenue (PAD) of Fakfak Regency and to find out the impact of regional levies on the receipt of Daserah Original Revenue for the Marine and Fisheries Sector of Fakfak Regency. The research method used is a qualitative research method. Seeing the existing reality, the marine and fisheries sector has maximally made breakthrough efforts according to its role in order to increase Regional Original Revenue (PAD) as capital in regional development.*

Keywords: *Fakfak Regency, Marine and Fisheries Development in Fakfak Regency*

Abstrak Dalam Garis-Garis besar Haluan Negara pada Bab IV Pembangunan Lima Tahun Tahap Keenam bagian F bidang ekonomi butir 2 dikatakan bahwa “Pembangunan Kelautan dan Perikanan dilanjutkan dan lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan tingkat kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan diversifikasi produksi ikan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai ekspor. Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Fakfak selama pembangunan jangka panjang pertama telah menunjukkan hasil yang positif yang dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan produksi yang cukup tinggi disertai dengan meningkatnya konsumsi ikan masyarakat, meningkatnya pendapatan nelayan bagi masyarakat, meningkatnya pemasaran ikan antar pulau dan ekspor, meluasnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha pada sektor kelautan dan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Fakfak dan untuk mengetahui dampak retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daserah bagi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian Kualitatif. Melihat kenyataan yang ada bahwa sektor kelautan dan perikanan secara maksimal telah melakukan upaya-upaya terobosan sesuai peranannya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan modal dalam pembangunan daerah.

Kata Kunci: Kabupaten Fakfak, Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Fakfak

1. PENDAHULUAN

Dalam Garis-Garis besar Haluan Negara pada Bab IV Pembangunan Lima Tahun Tahap Keenam bagian F bidang ekonomi butir 2 dikatakan bahwa “Pembangunan Kelautan dan Perikanan dilanjutkan dan lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan lebih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan tingkat kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan diversifikasi produksi ikan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta

meningkatkan nilai ekspor. Agribisnis perikanan dikembangkan melalui pola perikanan inti rakyat dengan memperkuat koperasi, melalui pengembangan serta penerapan teknologi maju dalam berbagai usaha budidaya ikan di daerah pantai, tambak ikan air tawar serta usaha penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mana perlu diatur melalui pola pengusahaan yang menjamin penerimaan sebesar-besarnya bagi Negara. Perhatian khusus perlu diberikan kepada koperasi bersamaan dengan usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat serta peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Fakfak selama pembangunan jangka panjang pertama telah menunjukkan hasil yang positif yang dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan produksi yang cukup tinggi disertai dengan meningkatnya konsumsi ikan masyarakat, meningkatnya pendapatan nelayan bagi masyarakat, meningkatnya pemasaran ikan antar pulau dan ekspor, meluasnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha pada sektor kelautan dan perikanan.

Potensi sumberdaya alam pesisir dan kelautan merupakan sumberdaya yang paling menonjol di Kabupaten Fakfak terutama dengan keberadaan hutan mangrove, estuaria, terumbu karang dan padang lamun yang masih alami yang menjadi tempat berkembang biak dan bertumbuh hidup aneka ikan dan biota laut. Dalam pengembangan sub sektor ini terbagi atas perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Jenis perikanan tangkap terbagi menjadi tiga yaitu perikanan laut, darat, dan perikanan di perairan umum. Kelautan dan perikanan di Kabupaten Fakfak masih belum maksimal mengusahakan perikanan darat dan perikanan perairan umum, tetapi hanya mengusahakan perikanan laut yang meliputi perikanan di antara pulau-pulau. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Fakfak tercatat ada sebanyak 1.878 rumah tangga perikanan rakyat dengan 2.332 nelayan.

Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Fakfak pada tahun 2014 adalah perikanan di antara pulau yaitu sebesar 849,53 ton . Jenis ikan cakalang adalah salah satu hasil produksi dari sub sector perikanan yang terbanyak di Kabupaten Fakfak. Pada tahun 2016 produksinya mencapai 475,85 ton atau sekitar 56,02 persen dari total hasil perikanan. Selain ikan cakalang , ikan tuna juga memberikan hasil yang cukup banyak yaitu sebesar 165 ton (19,44 persen).

Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, seiring dengan itu maka pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan sedemikian rupa sehingga selaras dengan program pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Fakfak selama pembangunan jangka panjang pertama telah menunjukkan hasil yang positif yang dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan produksi yang cukup tinggi disertai dengan meningkatnya konsumsi ikan masyarakat, meningkatnya pendapatan nelayan bagi masyarakat, meningkatnya pemasaran ikan antar pulau dan ekspor, meluasnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha pada sektor kelautan dan perikanan.

Sebagai salah satu sektor di bidang ekonomi, maka kelautan dan perikanan di Kabupaten Fakfak dituntut untuk lebih meningkatkan peranannya disektor ekonomi dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah maupun nasional. Dalam menunjang pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Fakfak khususnya di bidang ekspor non migas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak telah menghadirkan beberapa perusahaan perikanan dalam rangka peningkatan produksi dan peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sub sektor perikanan laut yang dilakukan adalah berupa bantuan peralatan tangkap dan modal usaha sehingga nantinya akan dapat meningkatkan produks perikanan yang optimal dan berkualitas serta mampu untuk memenuhi permintaan pasar dan dilain sisi juga dapat pula meningkatkan pendapatan nelayan itu sendiri.

Pendapatan sektor kelautan dan perikanan selama kurun waktu empat tahun dari 2016 sampai dengan 2019 sangat bervariasi, namun demikian upaya maksimal yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan daerah karena pada prinsipnya pembangunan nasional atau pembangunan daerah dilakukan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan berpedoman pada azas kekeluargaan dengan memperhatikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab seluruh rakyat.

Melihat kenyataan yang ada bahwa sektor kelautan dan perikanan secara maksimal telah melakukan upaya-upaya terobosan sesuai peranannya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan modal dalam pembangunan

daerah. Berangkat dari uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan menganalisis masalah tersebut dengan mengambil judul :

“PERANAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN FAKFAK”.

Adapun beberapa teori yang digunakan dalam penulisan ini yakni; (1) Sumber Pendapatan Daerah, (2) Pendapatan Asli Daerah: Pajak Daerah, (3) Sistem Perpajakan Daerah, (4) Aspek Keadilan Dalam Pengenaan Pajak, dan (5) Pendapatan Asli Daerah: Retribusi Daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas , maka penulis dapat merumuskannya sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan sektor Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Fakfak ?
2. Bagaimana dampak retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagi sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak ?

Pembatasan Masalah

Memperjelas arah penulisan ini, maka saya dapat membatasi pokok permasalahan yaitu : Analisis Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Fakfak, khususnya melalui sumber penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Keterangan Asal (SKA)..

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Fakfak.
- b. Untuk mengetahui dampak retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak, yang beralamat di Jalan Kesehatan Kelurahan Wagom Utara Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dipakai yaitu ; sumber data

primer (data kualitatif & data kuantitatif) dan sumber data sekunder (data sekunder internal & data sekunder eksternal).

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membutuhkan data-data yang lengkap guna mendukung dan menunjang pelaksanaan penyelesaian penulisan ini, penulis memperoleh data yang bersumber dari : Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak melalui pengamatan atau observasi dan wawancara langsung. Data Sekunder yaitu : data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan dalam bentuk dokumen, laporan, dan daftar yang berkaitan dengan penulisan ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah Metode Lapangan (*Field Research*) yaitu pendekatan secara langsung pada lokasi kegiatan. Dalam melakukan pendekatan ini, penulis melakukan empat cara yaitu : 1) Interview, 2) Observasi, 3) Dokumentasi, 4) Metode Kepustakaan (*Library Research*).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan yang ditemukan ada 2 yakni, Peranan Sektor Kelautan dan Perikanan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Fakfak dan Dampak Retribusi Daerah Terhadap Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak.

Peranan Sektor Kelautan dan Perikanan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Fakfak

Pendapatan sektor kelautan dan perikanan bersumber dari penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Keterangan Asal (SKA) yang merupakan sumber penerimaan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Keterangan Asal (SKA) mengacu pada Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Usaha Perikanan serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dalam pembahasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Keterangan Asal selama empat tahun terakhir dari tahun 2016- sampai dengan tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penerimaan Retribusi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Keterangan Asal (SKA) pada Tahun 2016- 2019 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut :

| Jenis Usaha | Tahun 2016 (Rp) | Tahun 2017 (Rp) | Tahun 2018 (Rp) | Tahun 2019 (Rp) |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Penangkapan | 344.170.273,- | 175.210.025 | 100.000.000,- | 100.000.000,- |
| Pengumpulan | 150.000.000,- | 150.420.050,- | 130.250.150,- | 100.115.350,- |
| SKS Peng.Hasilan Perikanan | 150.000.000,- | 125.210.025 | 100.250.050,- | 120.000.000,- |
| Jumlah | 644.170.273,- | 450.840.100,- | 330.500.200,- | 320.115.350,- |

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak

Mencari tingkat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Rata-rata kenaikan harga dari sumber penerimaan retribusi yang berasal dari penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Keterangan Asal (SKA) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Menghitung Target PAD berdasarkan Retribusi yang dikenakan pada Perizinan tertentu dengan langkah-langkah yaitu :

- a) Mencari realisasi data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan selama 4 tahun yang lalu.
- b) Menghitung tingkat kenaikan dari masing-masing Penerimaan PAD yang berasal dari SIUP dan SKA, dengan cara :

$$TK = \frac{Nt - Nt-1}{Nt-1} \times 100 \%$$

- c) Menghitung rata-rata tingkat kenaikan dari masing-masing PAD untuk SIUP dan SKA :

$$Xtk = \frac{tk}{N}$$

- d) Memproyeksikan masing-masing target penerimaan PAD dengan cara :

$$Pt = (Xtk + 100 \%) Nt-1$$

Keterangan :

Nt : Data tahun di depan (data tahun bersangkutan)

Nt-1 : Data tahun di belakang (data 1 tahun sebelumnya)

| | |
|-----|--|
| TK | : Tingkat Kenaikkan |
| XTK | : Rata-rata tingkat kenaikan |
| Tk | : Total tingkat kenaikan |
| N | : Banyaknya kenaikan |
| IHt | : Indeks harga pada tahun bersangkutan |
| Ht | : Harga pada tahun bersangkutan |
| Hto | : Harga tahun dasar. |

- Kenaikkan Penerimaan Pertahun dari SIUP dan SKA :

$$2015-2017 = \frac{644.170.273 - 450.840.100}{450.840.100} \times 100 \% = 43 \%$$

$$2016-2018 = \frac{450.840.100 - 330.500.200}{330.500.200} \times 100 \% = 36 \%$$

$$2017-2019 = \frac{330.500.200 - 320.115.350}{320.115.350} \times 100 \% = 3,24 \%$$

- Menghitung rata-rata tingkat kenaikan PAD, adalah :

$$= \frac{43 \% + 36 \% + 3,24 \%}{3} = 27,41 \%$$

- Menghitung Tingkat Kenaikkan Real (TKR) :

$$= 27,41 \% - 0 \% = 27,41 \% = 27 \%$$

- Membuat proyeksi 4 tahun mendatang :

$$2020 = (100 \% + 27 \%) \times 320.115.350,- = 406.546.495$$

$$2021 = (100 \% + 27 \%) \times 406.546.495 = 516.314.049$$

$$2022 = (100 \% + 27 \%) \times 516.314.049 = 665.718.842$$

$$2023 = (100 \% + 27 \%) \times 665.718.842 = 845.462.929$$

Dari hasil analisis peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak yang berasal dari sumber penerimaan Perizinan tertentu dari Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Keterangan Asal dari tahun tahun 2015 – 2017 sebesar 43 %, dari tahun 2016 – 2018 sebesar 36 %, dari tahun 2017 – 2019 penerimaan Retribusi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Keterangan Asal (SKA) menurun sebesar 3,24 %, dari hasil analisis ini menunjukkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2016 - 2019 selalu berubah atau berfluktuasi dan hasilnya meningkat terlihat pada tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan sebesar

43 % dari penerimaan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Keterangan Asal (SKA) sebesar Rp.664.170.273,-. Sedangkan rata-rata tingkat kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015-2017 sebesar 27 % bila dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah.

Proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk 4 (empat) tahun mendatang dari sektor Kelautan dan Perikanan yang Kabupaten Fakfak yang berasal dari Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Keterangan Asal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu, pada tahun 2020 sebesar Rp.406.546.495, tahun 2021 sebesar Rp.516.314.049,-, tahun 2022 sebesar Rp.665.718.842,- dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 845.462.929,-.

Dampak Retribusi Daerah Terhadap Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak

- Dampak Positif

Penerimaan PAD dari sektor kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak terus mengalami peningkatan berdasarkan target yang sudah ditetapkan. Dari hasil upaya tersebut maka sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Fakfak memperoleh kontribusi kembali dalam bentuk kegiatan-kegiatan belanja modal dan belanja pembangunan, sebagai contoh :

1. Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan sebagian tersentuh kepada masyarakat nelayan sesuai kebutuhannya meskipun belum memadai dan merata.
2. Operasionalisasi umum seperti transportasi laut dan transportasi darat terpenuhi walaupun masih terbatas.
3. Dibangunnya Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak digunakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan untuk melindungi yang lemah dalam perekonomiannya.
4. Armada Kapal harus dipertahankan artinya jangan mempersulit nelayan atau para pengusaha perikanan.

- Dampak Negatif

Pendapatan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Fakfak sangat penting peranannya dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, namun dampak negatif yang dirasakan oleh pengusaha perikanan dan masyarakat sebagai pelaut atau nelayan sangat menonjol, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dari tahun ke tahun tentu menetapkan target serta mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan sendirinya hal ini menjadi salah satu tugas dan tanggungjawab Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mencari solusi agar meningkatkan retribusi seterusnya.
2. Solusi yang dilakukan menekan atau mempersulit masyarakat nelayan dengan menaikkan tarif retribusi akhirnya para nelayan akan meninggalkan daerah setempat dan pergi berusaha di daerah lain, misalnya pengusaha telur ikan terbang dari data yang ada untuk tahun 2016 sebanyak 800 buah kapal sedangkan tahun 2017 telah mengalami penurunan sebanyak 400 buah kapal. Jadi sekitar 400 buah kapal telah meninggalkan Daerah Kabupaten Fakfak dan berpindah ke daerah lain. Disamping itu bagi kapal-kapal perikanan dikenakan retribusi yang berbeda-beda :
 1. Kapal yang berukuran di atas 5 – 10 GT (Gross Ton) dikenakan tarif Rp. 75.000,-/Kapal
 2. Kapal yang berukuran di atas 10 – 20 GT sebesar Rp. 150.000,- / Kapal.
 3. Kapal yang berukuran di atas 10 – 30 GT sebesar Rp.300.000,-/Kapal.

4. SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Penerimaan Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak, melalui Surat Izin Usaha (SIUP) dan Surat Keterangan Asal (SKA) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.664.170.273,- atau 43 persen (%) namun pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 320.115.350,- atau 3,24 persen (%) dalam penerimaan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan proyeksi penerimaan PAD untuk 4 (empat) tahun yang akan datang dari 2020 sampai dengan 2023 dapat mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sesuai visi dan misi sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Fakfak sebesar Rp.845.462.929,-
- b) Retribusi yang dikenakan pada Perizinan tertentu pada Surat Izin Usaha Perikanan dan Surat Keterangan Asal yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan dan kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan disetor setiap bulan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Fakfak

dan dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan melalui Pendapatan Asli Daerah, tersebut karena retribusi ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah yang akan dikembalikan kepada masyarakat melalui penerangan lampu-lampu jalan, perbaikan pasar ikan, dan pembangunan jembatan, selain itu melindungi yang lemah dalam perekonomian.

Disamping itu juga membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama dalam hal sistem retribusi yang progresif yaitu sistem pengenaan retribusi dimana semakin tingginya dasar retribusi seperti tingkat penghasilan wajib retribusi, atau harga barang mewah dan sebagainya maka akan dikenakan pungutan retribusi yang semakin tinggi persentasenya dan sistem retribusi progresif ini dapat bermanfaat untuk redistribusi pendapatan dalam masyarakat di daerah.

- c) Pungutan retribusi daerah yang selama ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah yang menunjukkan kelemahan pada jenis retribusi perizinan tertentu yang tidak efektif dalam kaitannya dengan usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. (2000, October 3). *APBN yang sehat dalam perekonomian sulit*. Kompas.
- Arifin, B. (2000, October 11). *Penajaman kebijakan fiskal dalam RAPBN 2001*. SK Media Indonesia.
- Devas, N. (1987). *Keuangan daerah di Indonesia: Sebuah tinjauan umum*. Dalam N. Devas, B. Brian, A. Booth, K. Davey, & R. Kelly (Eds.), *Keuangan pemerintah daerah di Indonesia* (hlm. xx-xx). Penerbit Universitas Indonesia.
- Irawan, & Suparmoko, M. (1998). *Ekonomi pembangunan* (Edisi kelima). BPFE.
- Mulyono, E. L. (1998). *Peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah*. Harvarindo.
- Setia Tunggal, H. (2000, January). *Peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah*. Harvarindo.